



KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN 2023

*** Hasyim Asyhari, S.Sos, M.Si**

**** Kepala Bidang P3Dasi**

***** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur**



OVERVIEW

MANAJEMEN ASN



Reformasi Birokrasi Kelas Dunia



- Delayering (penyederhanaan)
- Mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif

Organisasi

SDM Aparatur

- Strategi 6P

Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja & Penghargaan, Pengembangan Karier, Peningkatan Kesejahteraan

- Digitalisasi pelayanan publik
- Digitalisasi proses bisnis internal (tata kelola pemerintahan digital)

Tata Laksana

Regulasi

Deregulasi Kebijakan

Paradigma SDM



1

ASN Tidak Kompeten



Setengah dari populasi sudah menua (aging)



Maka kita perlu memastikan ASN sisanya bisa dikembangkan kompetensinya, dicerdaskan dan ditingkatkan kapasitasnya.

2



Talent mobility penting untuk peningkatan kapasitas pegawai. Namun masih terkendala beda tunjangan antar OPD.

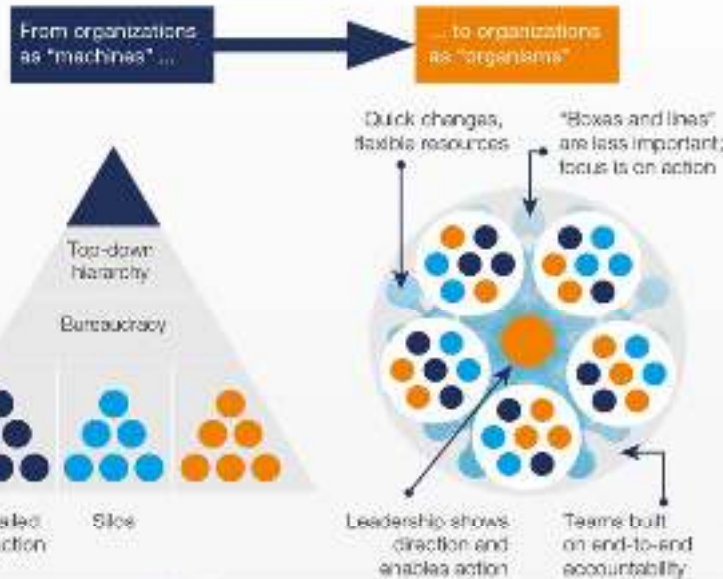
3



Merit Sistem dalam pengelolaan ASN dengan mengedepankan Skill, Knowledge, Attitude.



Paradigma Organisasi Pemerintahan



Perubahan paradigma organisasi
Perubahan cara kerja
Perubahan cara adaptasi

- 1 Organisasi Pemerintah yang sebelumnya top down beralih menjadi **agile organisasi**.
- 2 Membutuhkan pemimpin yang adaptif dan fleksibel. (**beban berat manajerial pada eselon 3 dan eselon 2**)
- 3 Tata kerja yg strukturalis beralih pada orientasi hasil kerja.



Paradigma Regulasi



1

Inovasi diarahkan pada Deregulasi Kebijakan.

2

Penyederhanaan regulasi diarahkan pada penyederhanaan layanan kepada masyarakat.

3

Inovasi dimaknai secara luas sebagai bagian menghadirkan layanan yang cepat, mudah, murah. Tidak hanya sekedar menghasilkan inovasi teknologi. Inovasi diarahkan pada Deregulasi Kebijakan.



Keadaan Oktober 2022



Statistik Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur

80.330

**OPTIMIS
JATIM
BANGKIT**

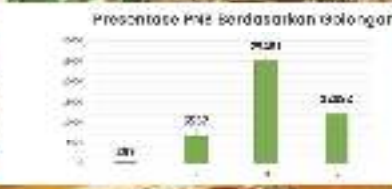
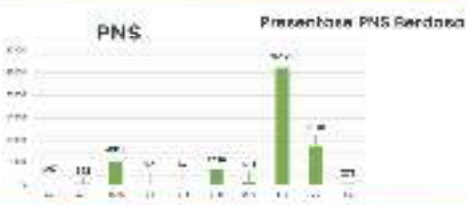
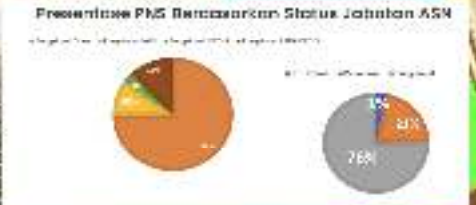
ASN Disabilitas

Fisik	28
Sensorik	13
Mental	2

Prediksi
Pensiun BUP
Bulan

188

Total ASN		Total Non ASN	
54.024		26.306	
PNS	21.039	411 - Undt	411 - Undt
CPNS	1.388	6.839	9.595
PPK Non Guru	501		PTT - PK
PPK Guru	9.096		9.872





STATISTIK GENERASI PNS PEMROV JATIM

Generasi Y

- Semangat tinggi/optimis
- Open minded, cepat belajar, melek teknologi
- Mudah bergaul, suka bekerja dalam tim
- Siap lompat ke kesempatan yang lebih baik
- Tidak fokus
- Tertarik pada uang

Generasi Z

- High tech
- Kebebasan tinggi
- Individualisme tinggi
- Soc-mek geek
- Multitasking
- Efisien, kreatif, inovatif
- Standar kehidupan tinggi

6.299 **11,45%**
Baby Boomer

1,23%
Gen Z 682

55,27%
Gen X 30.406

32,03%
Gen Y 17.620

Kontribusi Kita

- Berkomunikasi baik lintas generasi
- Memahami karakter tiap-tiap generasi
- Lebih menguasai teknologi informasi untuk peningkatan kinerja



PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023



Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 56)



APARATUR SIPIL NEGARA

UU 5 TAHUN 2014



SKN
BKN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS Jo. PP
17 TAHUN 2020



Jabatan
Fungsional

PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

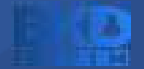
PPPK

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK

PNS & PPPK

MENGISI JABATAN
PEMERINTAHAN
&
MELAKSANAKAN
TUGAS PEMERINTAHAN

- 1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK
- 2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK
- 3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2019 ttg Pembinaan JF PPPK
- 4) Keputusan Menteri PANRB No. 1197/2021 tentang Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK
- 5) Keputusan Menteri PANRB No. 76/2022 tentang Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK



**DATA BUP
PEGAWAI**



**TUPOKSI
PERANGKAT
DAERAH**



**ALOKASI CASN
TAHUN
SEBELUMNYA**



**ANJAB
dan ABK**



**KEMAMPUAN
FISKAL**

**USULAN KEBUTUHAN
PPPK**

**KOMPOSISI
PENYUSUNAN KEBUTUHAN
PEGAWAI**

PENGADAAN ASN TAHUN 2022



Usulan dan Penetapan Formasi PPPK Tahun 2022 di Dinas Sosial

NAMA PERANGKAT DAERAH	USULAN	PENETAPAN
DINAS SOSIAL	64	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1	0
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	3	3
PEMULA - PEKERJA SOSIAL	60	0

Berdasarkan:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 621 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

Balasan Surat Kepala BKD Jawa Timur Perihal Rekom Formasi JF Pekerja Sosial Pemula



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI
Jl. Lapangan Banteng No. 1, Gedung Cendekia, Jakarta Selatan 12111 Telp. (021) 5317741-46, 5318443-45 ext. 2032

Nomor : 1492/7.2/KP.09.02/7/2022 20 Juli 2022
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Yth.
Kepala BKD Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Merindukanjuti Surat Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Juli 2022 dengan Nomor Surat 871/4865/204.2/2022 perihal Formasi Jabatan JF Pekerja Sosial pada Rekrutmen PPPK TA. 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Kementerian Sosial RI sebagai instansi Pembina jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial tidak keberatan atas permohonan saudara terkait dengan penerimaan melalui jalur PPPK pada jenjang Pelaksana/Pemula.
2. Perlu diperhatikan tentang kualifikasi Pendidikan dari SMK Jurusan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial, dan atau SMA Sederajat yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam jabatan pekerja sosial
3. Pelaksanaan dan penetapan penerimaan pekerja sosial melalui jalur PPPK dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan,
Pelatihan, dan Pengembangan
Profesi



Afrizon Tanjung

Tembusan :
1. Sekretaris Menteri PAN dan RB
2. . Kepala BKN di Jakarta
3. Biro OSDM Kemensos RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang disertai dan Basi Sertifikasi Elektronik (SSE).
OSDN



ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2022

“ Pengadaan ASN Tahun 2022 dilakukan **hanya untuk PPPK**

(Sesuai SE Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 tanggal 22 Oktober 2021)

BERFOKUS PADA PELAYANAN DASAR (GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

Sisa formasi kebutuhan guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

KEBERPIHAKAN KEPADA EKS THK-II

Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak



PANDEMI COVID-19 DAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas.

GAJI DAN TUNJANGAN

Kebutuhan ASN diusulkan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan: Gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Perpres 98 Tahun 2020

KEBIJAKAN PENGADAAN PPPK TAHUN 2022 (PERMENPAN 29/2021)

PERMENPAN 20/2022

Pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Th 2022

1. Pelamar Prioritas I, II, III:
2. Pelamar Umum

KEPMENPAN 969/2022

NAB Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Untuk JF Dosen T.A. 2022

KEPMENPAN 971/2022

NAB Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Untuk JF T.A. 2022

KEPMENPAN 968/2022

Mekanisme Seleksi PPPK Untuk JF Tenaga Kesehatan

1. (10%) Disabilitas
2. (35%) Daerah 3T
3. (25%) Berusia 35 th ke atas & Masa kerja paling singkat 3 th
4. (15%) Faskes tempat bekerja saat ini
5. (5%) Penugasan dr Kemkes

KEPMENPAN 970/2022

Persyaratan Wajib Tambahan & Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dlm Pengadaan PPPK Untuk JF Teknis



panrb
KOMISI
PENYUSUNAN DAN
PENGANTARAN PELAYANAN

Persyaratan Pengalaman Kerja Bagi Pelamar

- Untuk JF jenjang Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama: Paling singkat **2 tahun** di bidang kerja yang relevan dengan JF yang dilamar.
- Untuk JF jenjang Ahli Muda: Paling singkat **3 tahun** di bidang kerja yang relevan dengan JF yang dilamar.
- Untuk JF jenjang Ahli Madya: Paling singkat **5 tahun** di bidang kerja yang relevan dengan JF yang dilamar.

dibuktikan dengan

- Bagi yang bekerja di Instansi Pemerintah: Surat Keterangan paling rendah oleh JPT Pratama.
- Bagi yang bekerja pada perusahaan swasta/lembaga non-pemerintah: Surat Keterangan paling rendah oleh Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM

BerAKHLAK
Komitmen Program, Kualitas Layanan,
Kerjasama yang Lebih Baik

menpan.go.id

KEBIJAKAN PENDATAAN NON-ASN 2022



SE MENPANRB 22 JULI 2022



5 KETENTUAN HONORER YANG AKAN DIDATA UNTUK BISA IKUT CPNS DAN PPPK

1. Honorer K2 yang terdaftar pada database ASN & pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN (instansi pusat) dan APBD (instansi daerah). Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

4. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.

5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

Rekapitulasi Pendataan Tenaga Non ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO	JENIS KETENAGAAN	MASUK PENDATAAN	TIDAK MASUK PENDATAAN	KETERANGAN
1	Pegawai BLUD Non PNS	12	5.212	12 orang THK-2
2	PTT-PK	4.175	415	
3	GTT	20.686	-	1.367 eks THK-2
	Total	24.873	5.627	

Data Non ASN Dinas Sosial:

PTT-PK : 294 Orang

Eks THK II : 9 Orang

Non PTT-PK : 129 Orang

Jumlah : 432 Orang



Kemana Pegawai Non ASN Pasca 28 November 2023 ???

Bagaimana Kebijakan di Pemprov Jatim ???



KENDALA

- Tidak semua jabatan dapat dipenuhi melalui PPPK, dikarenakan harus Jabatan Fungsional
 - contoh: Penjaga Pintu Air pada Dinas PU SDA
 - Petugas Penagih Pajak pada Bapenda
 - Tenaga Administrasi lainnya yang bukan Jabatan Fungsional
- Tenaga Keamanan, Petugas Kebersihan dan Pengemudi dapat dipekerjakan melalui Tenaga Alih Daya (outsourcing)
 - **Menghapus** status kepegawaian Non ASN hingga tenggat waktu 28 November 2023
 - **Tidak Diperbolehkan** melakukan perekrutan pegawai Non ASN
 - Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai Non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus CPNS/PPPK



JENIS KEPEGAWAIAN LAINNYA

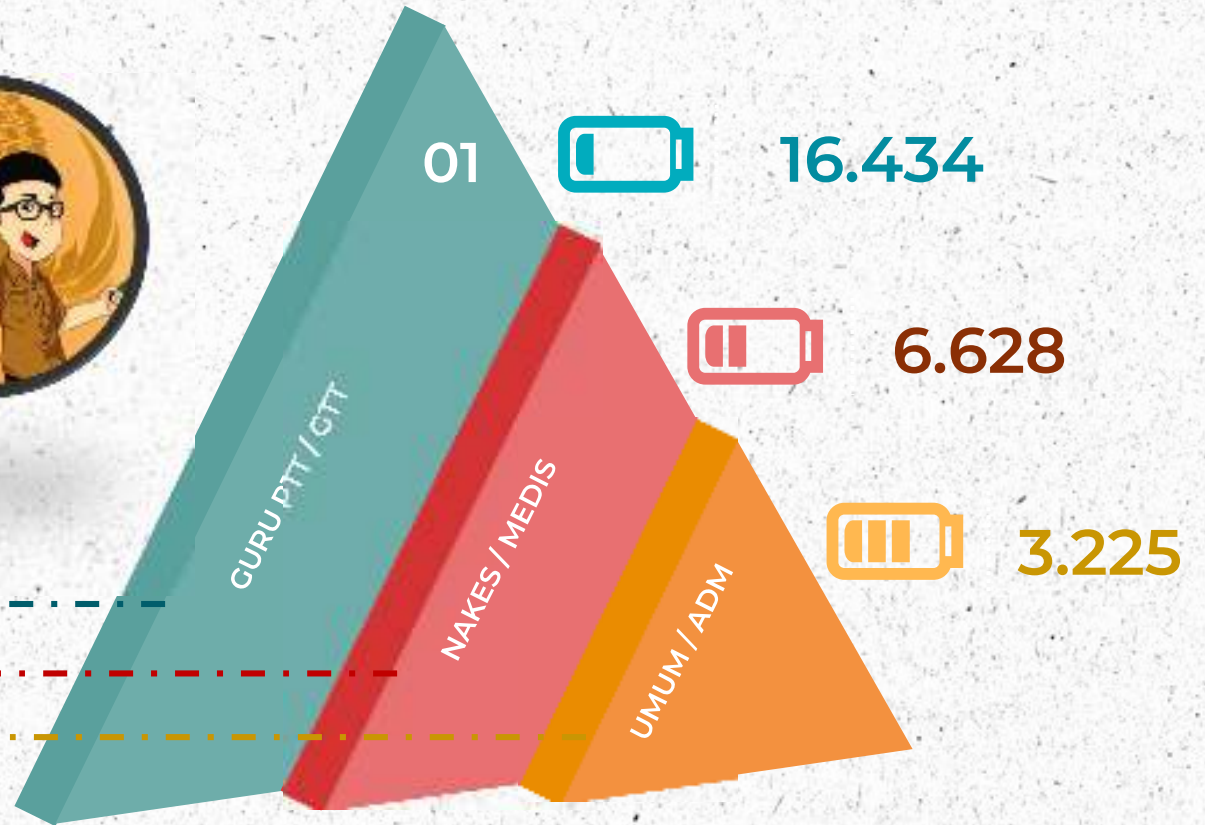
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2019:
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
- **PPNPN adalah:** Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan APBN
- **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar** adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran
- **Surat Perintah pembayaran diterbitkan oleh PPK**

KONDISI KEPEGAWAIAN PEMROV JAWA TIMUR



26.287

Hingga 22 Juni 2022



Keputusan Gubernur ←

Pegawai BLUD / RS ←

Teknis Administratif ←

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS DI PEMPROV JATIM



PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PTT-PK)



PERANGKAT
DAERAH



BKD

1. Verifikasi usulan berdasarkan formasi
2. Seleksi / Tes
3. Rekomendasi pengangkatan
4. Penetapan Nomor Induk PTT-PK
5. Rekomendasi penilaian kinerja
6. Rekomendasi pemberhentian

Dikelola menggunakan Aplikasi sejak 2014

1. Usulan kebutuhan/formasi PTT-PK
2. Pembayaran gaji dan tunjangan
3. Penilaian kinerja **bulanan**



**BPKA
D**

1. Verifikasi kebutuhan gaji dan tunjangan PTT-PK
2. Rekomendasi pembayaran gaji dan tunjangan PTT-PK

Pendapatan PTT-PK sesuai UMR (4,3 juta)

PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

PERSPEKTIF MENPAN-RB

- Tenaga non ASN diserap melalui formasi PPPK baik Guru dan Nakes
- GAP kompetensi Pegawai Non ASN disolusikan melalui program peningkatan kompetensi
- **Non ASN diberhentikan, dapat diberikan kesempatan sesuai minat**
 - Pelatihan pengembangan Wirausaha
 - Kartu PRAKERJA
 - Outplacement BUMN, BUMD, Swasta
 - Diberikan pesangon



PERSPEKTIF PEMDA

- **Mebutuhkan kinerja Non ASN akibat kebijakan kurangnya pemenuhan formasi PNS**
- **Penghapusan Tenaga Non ASN Tahun 2023 berdampak pada pelayanan publik**

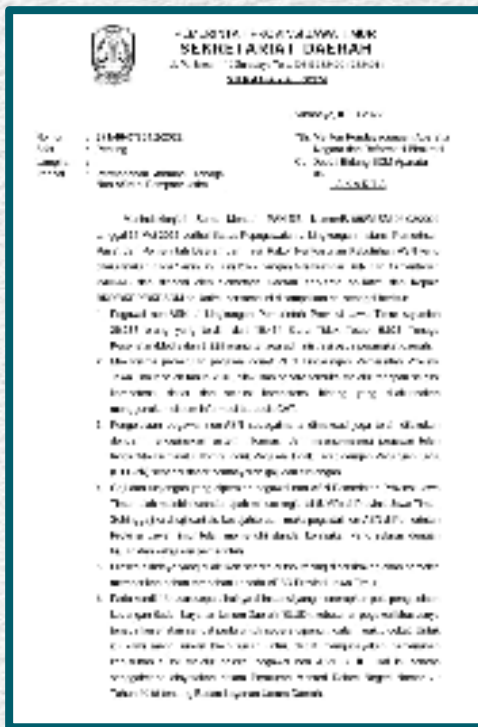
PERSPEKTIF NON ASN

- **Mebutuhkan pekerjaan dan kesejahteraan**

DISCLAIMER:

- Rekrutmen PPPK efektif digelar di tahun 2021 dengan serapan formasi yg minus growth; dan
- Pemda terkendala keterbatasan anggaran.

RESPON PEMPROV JATIM TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TENAGA NON ASN



PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dialihdayakan kepada jenis kepegawaian **Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)**;

Pegawai Non ASN dapat digaji melalui skema pengadaan menggunakan belanja jasa sehingga gaji Pegawai Non ASN masuk belanja operasional

Instansi yang menerapkan **pola pengelolaan keuangan BLUD** khususnya Rumah Sakit diberikan keleluasaan untuk melakukan rekrutmen tenaga Non-ASN untuk melaksanakan pelayanan kesehatan (pelayanan dasar) kepada masyarakat;

Pemerintah Daerah hendaknya diberikan waktu yang cukup untuk melakukan **pemetaan dan penataan kebutuhan PPK hingga tahun 2025.**

Untuk itu, dimohon instansi pusat melakukan advokasi bersama instansi yang berkepentingan untuk mengakomodir penambahan DAU di daerah.

Penghargaan BKN Award 2022



**Terbaik Implementasi
Manajemen ASN**



**Terbaik I Perencanaan
Kebutuhan dan Mutasi**



**Terbaik IV Penilaian
Kompetensi**

Thanks!

Do you have any questions?
formasi.jatimprov@gmail.com



CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#).